



RENJA PERUBAHAN 2024

DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN



DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DKUKMPP



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari penyelesaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026.

Dalam Rencana Kerja ini, kami berupaya untuk konsisten terhadap agenda pembangunan Kabupaten Nunukan utamanya ***“Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera”***,

Guna mendukung agenda tersebut, maka Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan telah Menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA), dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari aspek pengukuran kinerja kegiatan maupun dari aspek keuangan, sehingga dampak yang diharapkan adalah terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada segenap pejabat dan staf dilingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan yang telah memberikan motivasi, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan tahun 2024 ini dapat terselesaikan dengan baik.



Akhirnya hanya kepada Allah SWT kami memohon dengan harapan agar rencana yang telah dituangkan dapat diwujudkan dalam implementasinya.

Nunukan, Juli 2024

Kepala Dinas

Sabri, ST., M.Si

**Pembina Utama Muda IV/ C
NIP.19720109 200212 1 005**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASILEVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
BAB V PENUTUP	31



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Sejalan dengan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan

Maka dengan ini Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Melakukan Perubahan Rencana Kerja Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang di dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan lingkungan mengharuskan setiap lembaga Pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel.



RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD yang mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

RENSTRA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan sasaran, dan strategi didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah, aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan



Perdagangan membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan dan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Tujuan menciptakan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan, sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 1 tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dilaksanakan tahun 2024.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

2.1 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun 2024 yang telah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagai berikut :



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

**Rekapulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan
Pencapaian Renstra Dinas Perdagangan s/d Triwulan II Tahun 2022 Kabupaten Nunukan.**

(Lampiran I)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024 (kumulatif Triwulan I dan Triwulan II)		Persentase Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		Catatan Penting
				Kinerja	(Rp.)	Kinerja	(Rp.)	
1	2		3	4	5	6	7	18
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Unit Kerja Internal Yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	2.903.577.405,00	100	55,57	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	5	11.838.000,00	62,50	13,45	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	0,00	50,00	0,00	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	11.838.000,00	66,67	23,68	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan	0	2.599.181.591,00	0,00	63,41	
	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	0	2.599.181.591,00	0,00	63,41	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Umum	0	37.902.900,00	0,00	9,62	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	0	0,00	0,00	0,00	
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1	22.268.400,00	33,33	44,58	
	3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	0	720.000,00	0,00	1,67	
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	2	14.914.500,00	20,00	7,47	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan penyediaan Jasa Penunjang	0	225.352.559,00	0,00	42,48	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	299.000,00	50,00	5,98	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan Listrik Yang Disediakan	6	9.643.559,00	50,00	27,71	
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Di Sediakan	6	215.410.000,00	50,00	43,90	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Pemeliharaan BMD	0	29.302.355,00	0,00	25,82	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Di Pelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	29.302.355,00	11,54	31,34	
	2	Pemeliharaan Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	0	0,00	0,00	0,00	
	3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	0	0,00	0,00	0,00	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

II	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang di Lakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	8,62	35.084.000,00	77,14	27,73	
1	<i>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjaman Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Koperasi Yang Diperiksa dan Diawasi Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	38	35.084.000,00	190,00	27,73	
	1 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Koperasi Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	38	35.084.000,00	95,00	27,73	
III	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Pengelola Koperasi Yang Meningkatkan Kapasitasnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	<i>Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Pemahaman Perkoperasian</i>	0	0,00	0,00	0,00	
	1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan dan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasi	0	0,00	0	0,00	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Volume Usahnya	0,00	13.940.000,00	0,00	26,25	
1	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah koperasi Yang Diberdayakan dan Dilindungi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	25	13.940.000,00	50,00	26,25	
	1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	25	13.940.000,00	83	26,25	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

V	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	8,07	68.351.000,00	68,53	31,30	
1	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan , Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>		<i>Jumlah Usaha Mikro Yang Diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	64	68.351.000,00	91,43	31,30	
	1	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan	0	68.351.000,00	0,00	91,17	
	2	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	64	0,00	128,00	0,00	
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Ratio Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	0,00	5.700.000,00	0,00	4,89	
1	<i>Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>		<i>Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	0	5.700.000,00	0,00	4,89	
	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM Yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi	0	5.700.000,00	0,00	4,89	
VIII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi Layak / Sehat	0,00	146.788.000,00	0,00	44,46	
1	<i>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya</i>		<i>Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina</i>	0	146.788.000,00	0,00	44,46	
	1	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0	146.788.000,00	0,00	44,46	Pergitungan Di akhir Triwulan di Karenakan Laporan Pasar Setiap Bulan
VIII	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	20,00	185.800.020,00	865,80	12,12	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Diawasi	10	0,00	45,45	0,00	
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah pengendalian harga dan Stok barang kebutuhan pokok yang dilaksanakan	9	167.184.020,00	60,00	60,23	
	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6	31.324.020,00	60,00	46,31	
	2	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	3	135.860.000,00	60,00	64,72	
3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pupuk Bersubsidi yang disalurkan yang diawasi	817	18.616.000,00	27,23	54,27	
	1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan pengawasan Penyaluran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2	18.616.000,00	66,67	54,27	
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Ekspor Bersih Perdagangan	716.380.311.707,56	19.510.884,00	163,85	3,53	
1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pameran Dagang dan Misi Dagang Yang Diikuti	0	19.510.884,00	0,00	3,53	
	1	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0	19.510.884,00	0,00	7,27	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	2	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	0	0,00	0,00	0,00	
	3	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0	0,00	0,00	0,00	
	4	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	0	0,00	0,00	0,00	
X	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase UTTP Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	71,72	84.522.745,00	119,53	31,17	
1	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Ditera/Tera Ulang Dalam Tahun Berjalan	71,72	84.522.745,00	133,55	31,17	
	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang	Jumlah Alat Ukur , Alat Takar , Alat Timbang , dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	601	60.125.588,00	133,56	36,10	
	2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal Yang Dibina	6	24.397.157,00	50,00	23,31	
XI	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Produk Unggulan Daerah Yang Meningkatkan Penjualannya	0,00	11.055.478,00	0,00	15,36	
1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	11.055.478,00	33,33	15,36	
	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	4	0,00	400,00	0,00	
	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kementrian Dengan Retail, <i>Marketplace</i> , Perhotelan dan Jasa Akomodasi	4	11.055.478,00	200,00	30,72	
XII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Peningkatan Jumlah Sentra IKM	0,00	220.287.215,00	0,00	31,85	
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	0	220.287.215,00	0,00	31,85	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Kordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	0	2.040.000,00	0,00	10,14	
	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0	218.247.215,00	0,00	32,50	
XIII	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan oleh instansi terkait	0,00	31.002.000,00	0,00	47,54	
1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Verifikasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	20	31.002.000,00	200,00	47,54	
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	7	16.634.000,00	116,67	55,50	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	2	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	20	14.368.000,00	333,33	40,76	
XIV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase Data IKM Produktif di Kabupaten Nunukan	0,00	22.520.000,00	0,00	67,73	
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Tersedianya Data Informasi Lengkap dan Terkini	0	22.520.000,00	0,00	67,73	
	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	66	22.520.000,00	6.600,00	67,73	
JUMLAH TOTAL					3.748.138.747,00		40,12	



REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan pada tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 9.343.306.448,00** dan rincian penggunaan sampai dengan 30 Juni 2024 sebagai berikut :

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN			SISA ANGGARAN
			(Rp.)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	Keuangan (%)	(Rp.)
1	2		3	8	9	10	11
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.224.844.425,00	50,00	2.741.680.319,00	52,47	2.483.164.106,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		87.996.525,00	62,50	16.418.000,00	18,66	71.578.525,00
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.998.875,00	50,00	0,00	0,00	37.998.875,00
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.997.650,00	66,67	16.418.000,00	32,84	33.579.650,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.098.735.836,00	0,00	2.453.781.811,00	59,87	1.644.954.025,00
	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.098.735.836,00	0,00	2.453.781.811,00	59,87	1.644.954.025,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		394.182.800,00	0,00	37.902.900,00	9,62	356.279.900,00
	1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	101.505.160,00	0,00	0,00	0,00	101.505.160,00
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.955.840,00	33,33	22.268.400,00	44,58	27.687.440,00
	3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	43.171.000,00	0,00	720.000,00	1,67	42.451.000,00
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.550.800,00	20,00	14.914.500,00	7,47	184.636.300,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		530.441.264,00	0,00	202.485.253,00	38,17	327.956.011,00
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	50,00	299.000,00	5,98	4.701.000,00
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.800.000,00	50,00	12.276.253,00	35,28	22.523.747,00



DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	490.641.264,00	50,00	189.910.000,00	38,71	300.731.264,00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		113.488.000,00	0,00	31.092.355,00	27,40	82.395.645,00
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	93.488.000,00	11,54	31.092.355,00	33,26	62.395.645,00
	2	Pemeliharaan Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
II	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		126.529.875,00	77,39	35.084.000,00	27,73	91.445.875,00
1	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjaman Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		126.529.875,00	190,00	35.084.000,00	27,73	91.445.875,00
	1	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten /Kota	126.529.875,00	95,00	35.084.000,00	27,73	91.445.875,00
III	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		55.974.995,00	0,00	1.819.000,00	3,25	54.155.995,00
1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota		55.974.995,00	100,00	1.819.000,00	3,25	54.155.995,00
	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan dan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	55.974.995,00	83,33	1.819.000,00	3,25	54.155.995,00
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		53.099.910,00	0,00	13.940.000,00	0,00	39.159.910,00
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		53.099.910,00	0,00	13.940.000,00	0,00	39.159.910,00
	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	53.099.910,00	83,33	13.940.000,00	0,00	39.159.910,00
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		218.339.221,00	68,53	68.351.000,00	31,30	149.988.221,00



DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

1	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan , Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>		218.339.221,00	91,43	68.351.000,00	31,30	149.988.221,00
	1	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	74.969.221,00	0,00	68.351.000,00	91,17	6.618.221,00
	2	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	143.370.000,00	128,00	0,00	0,00	143.370.000,00
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		116.527.825,00	0,00	5.700.000,00	4,89	110.827.825,00
1	<i>Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>		116.527.825,00	0,00	5.700.000,00	4,89	110.827.825,00
	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	116.527.825,00	0,00	5.700.000,00	4,89	110.827.825,00
VIII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		330.160.750,00	0,00	115.875.000,00	35,10	214.285.750,00
1	<i>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya</i>		330.160.750,00	0,00	115.875.000,00	35,10	214.285.750,00
	1	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	330.160.750,00	0,00	115.875.000,00	35,10	214.285.750,00
VIII	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		1.532.545.800,00	865,80	178.778.020,00	11,67	1.353.767.780,00
1	<i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		1.220.673.000,00	45,45	0,00	0,00	1.220.673.000,00
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	29.959.600,00	0,00	0,00	0,00	29.959.600,00
	2	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1.190.713.400,00	0,00	0,00	0,00	1.190.713.400,00
2	<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>		277.568.600,00	60,00	160.162.020,00	0,00	117.406.580,00
	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	67.639.200,00	60,00	24.302.020,00	35,93	43.337.180,00
	2	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	209.929.400,00	60,00	135.860.000,00	35,93	74.069.400,00



DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		34.304.200,00	27,23	18.616.000,00	54,27	15.688.200,00
	1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	34.304.200,00	66,67	18.616.000,00	54,27	15.688.200,00
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		552.081.450,00	163,85	16.172.084,00	2,93	535.909.366,00
1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		552.081.450,00	0,00	16.172.084,00	2,93	535.909.366,00
	1	Pameran Dagang Nasional	268.387.700,00	0,00	16.172.084,00	2,93	252.215.616,00
	2	Pameran Dagang Lokal	127.580.000,00	0,00	0,00	0,00	127.580.000,00
	3	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	117.224.900,00	0,00	0,00	0,00	117.224.900,00
	4	Peningkatan Citra Produk Ekspor	38.888.850,00	0,00	0,00	0,00	38.888.850,00
X	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		271.203.497,00	119,53	67.400.188,00	24,85	203.803.309,00
1	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		271.203.497,00	133,55	67.400.188,00	24,85	203.803.309,00
	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang	166.531.997,00	133,56	60.125.588,00	36,10	106.406.409,00
	2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	104.671.500,00	50,00	7.274.600,00	6,95	97.396.900,00
XI	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		71.980.830,00	0,00	11.055.478,00	15,36	60.925.352,00
1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		71.980.830,00	33,33	11.055.478,00	15,36	60.925.352,00
	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	35.997.230,00	400,00	0,00	0,00	35.997.230,00
	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	35.983.600,00	200,00	11.055.478,00	30,72	24.928.122,00
XII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		691.549.230,00	0,00	212.199.215,00	30,68	479.350.015,00
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota		691.549.230,00	0,00	212.199.215,00	30,68	479.350.015,00
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	20.120.000,00	0,00	1.020.000,00	5,07	19.100.000,00
	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	671.429.230,00	0,00	211.179.215,00	5,07	460.250.015,00



DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

XIII	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		65.218.640,00	0,00	31.002.000,00	47,54	34.216.640,00
1	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		65.218.640,00	200,00	31.002.000,00	47,54	34.216.640,00
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	29.970.000,00	116,67	16.634.000,00	55,50	13.336.000,00
	2	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	35.248.640,00	333,33	14.368.000,00	40,76	20.880.640,00
XIV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		33.250.000,00	0,00	7.140.000,00	21,47	26.110.000,00
1	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		33.250.000,00	0,00	7.140.000,00	21,47	26.110.000,00
	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	33.250.000,00	0,00	7.140.000,00	21,47	26.110.000,00
JUMLAH TOTAL			9.343.306.448,00	61,68	3.506.196.304,00	37,53	5.837.110.144,00



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Perencanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan merujuk pada sasaran dan kebijakan pemerintah daerah untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan ditentukanlah program dan kegiatan. Pada Perubahan Renja ini dilakukan beberapa penyesuaian program, kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut :



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

**Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Tahun 2022 Kabupaten Nunukan.**

(Lampiran II)

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA 2024						PAGU (Rp) TAHUN 2024			KETERANGAN
			RENJA		DPA		RENJA PERUBAHAN		RENJA	DPA	RENJA PERUBAHAN	
	SEBELUM		SEBELUM				SESUDAH		SEBELUM		SESUDAH	
1	2		3		4		5		6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	Persen	100	Persen	100	Persen	4.832.977.055,00	5.224.844.425,00	5.304.844.425,00	
1	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	88.000.000,00	87.996.525,00	87.996.525,00	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	38.000.000,00	37.998.875,00	37.998.875,00	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	50.000.000,00	49.997.650,00	49.997.650,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6	Unit Kerja	6	Unit Kerja	6	Unit Kerja	3.706.803.683,00	4.098.735.836,00	4.168.735.836,00	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26	Orang/Bulan	26	Orang/Bulan	24	Orang/Bulan	3.706.803.683,00	4.098.735.836,00	4.168.735.836,00	Penambahan Pembayaran Pajak PPH 21 dan Tunjangan Fungsional
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		6	Unit Kerja	6	Unit Kerja	6	Unit Kerja	382.413.500,00	394.182.800,00	394.182.800,00	
	1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2	Paket	2	Paket	2	Paket	77.243.100,00	101.505.160,00	101.505.160,00	
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	Paket	3	Paket	3	Paket	50.000.000,00	49.955.840,00	49.955.840,00	
	3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2	Paket	2	Paket	2	Paket	50.000.000,00	43.171.000,00	43.171.000,00	
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	205.170.400,00	199.550.800,00	199.550.800,00	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		6	Unit Kerja	6	Unit Kerja	6	Unit Kerja	555.759.872,00	530.441.264,00	540.441.264,00	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	34.800.000,00	34.800.000,00	44.800.000,00	Penambahan Pembayaran Listrik Bangunan Metrologi
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	515.959.872,00	490.641.264,00	490.641.264,00	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		6	Unit Kerja	6	Unit Kerja	6	Unit Kerja	100.000.000,00	113.488.000,00	113.488.000,00	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	26	Unit	26	Unit	26	Unit	80.000.000,00	93.488.000,00	93.488.000,00	
	2	Pemeliharaan Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	15	Unit	15	Unit	15	Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
	3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	1	Unit	1	Unit	1	Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
II	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		11,17	Persen	11,17	Persen	14,74	Persen	70.000.000,00	126.529.875,00	126.529.875,00	Perubahan Target Kinerja
1	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjaman Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		20	Koperasi	20	Koperasi	65	Koperasi	70.000.000,00	126.529.875,00	126.529.875,00	Perubahan Target Kinerja
	1	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten /Kota	40	Unit Usaha	40	Unit Usaha	65	Unit Usaha	70.000.000,00	126.529.875,00	126.529.875,00	Perubahan Target Kinerja
III	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		12,53	Persen	12,53	Persen	30,76	Persen	50.000.000,00	55.974.995,00	65.974.995,00	Perubahan Target Kinerja
1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota		25	Koperasi	25	Koperasi	30	Koperasi	50.000.000,00	55.974.995,00	65.974.995,00	Perubahan Target Kinerja
	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan dan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	30	Orang	30	Orang	55	Orang	50.000.000,00	55.974.995,00	65.974.995,00	Perubahan Target Kinerja dan Penambahan Pagu Anggran Rp.10.000.000



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		12,41	Persen	12,41	Persen	12,41	Persen	65.000.000,00	53.099.910,00	53.099.910,00	
1	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		50	Koperasi	50	Koperasi	50	Koperasi	65.000.000,00	53.099.910,00	53.099.910,00	
	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	30	Unit Usaha	30	Unit Usaha	50	Unit Usaha	65.000.000,00	53.099.910,00	53.099.910,00	
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		11,78	Persen	11,78	Persen	11,78	Persen	185.000.000,00	218.339.221,00	218.339.221,00	
1	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan , Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>		70	UMK	70	UMK	70	UMK	185.000.000,00	218.339.221,00	218.339.221,00	
	1	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	70	Unit Usaha	70	Unit Usaha	70	Unit Usaha	75.000.000,00	74.969.221,00	74.969.221,00	
	2	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50	Unit Usaha	50	Unit Usaha	70	Unit Usaha	110.000.000,00	143.370.000,00	143.370.000,00	
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		5,44	Persen	5,44	Persen	5,44	Persen	116.539.290,00	116.527.825,00	116.527.825,00	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

1	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		3	<i>Pelaku Usaha Kecil</i>	3	<i>Pelaku Usaha Kecil</i>	3	<i>Pelaku Usaha Kecil</i>	116.539.290,00	116.527.825,00	116.527.825,00	
	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	50	Unit Usaha	50	Unit Usaha	50	Unit Usaha	116.539.290,00	116.527.825,00	116.527.825,00	
VIII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		23,26	Persen	23,26	Persen	23,26	Persen	330.160.750,00	330.160.750,00	340.900.750,00	
1	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		27	<i>Orang</i>	27	<i>Orang</i>	27	<i>Orang</i>	330.160.750,00	330.160.750,00	340.900.750,00	
	1	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	9	Dokumen	9	Dokumen	9	Dokumen	330.160.750,00	330.160.750,00	340.900.750,00	Realisasi Pengawasan Sarana Distribusi Telah Terlaksana 90% (Penambahan Anggaran Pengawasan Pasar Rp. 10.740.000
VIII	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		2,31	Persen	2,31	Persen	50,00	Persen	1.533.005.837,00	1.532.545.800,00	1.588.809.160,00	Perubahan Target Persentase Barang Pokok Bertmbah Sesua Jumlah Barang Beredar Yang diawasi 11 Barang Pokok 7 Barang Penting dan Barang Lainnya 32
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		22	<i>Jenis Barang</i>	22	<i>Jenis Barang</i>	25	<i>Jenis Barang</i>	1.220.722.100,00	1.220.673.000,00	1.242.513.000,00	Perubahan Target Kegiatan Pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Akseibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	8,00	Laporan	8,00	Laporan	8,00	Laporan	29.979.000,00	29.959.600,00	51.799.600,00	Penambahan anggaran Pengawasan SOA Rp. 21.840.000
	2	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	8,00	Laporan	8,00	Laporan	8,00	Laporan	1.190.743.100,00	1.190.713.400,00	1.190.713.400,00	
2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		15	Kegiatan	15	Kegiatan	20	Kegiatan	277.799.200,00	277.568.600,00	308.561.540,00	Perubahan Target Kegiatan
	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	10	Laporan	10	Laporan	12	Laporan	67.639.200,00	67.639.200,00	77.639.200,00	Penambahan Anggaran Pengawasan Dan Pemantauan Harga dan Barang Pokok
	2	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	210.160.000,00	209.929.400,00	230.922.340,00	Penambahan Anggaran 10% Pelaksanaan Operasi Pasar
3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		3.000	Ton	3.000	Ton	3.000	Ton	34.484.537,00	34.304.200,00	37.734.620,00	
	1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	3	Laporan	3	Laporan	4	Laporan	34.484.537,00	34.304.200,00	37.734.620,00	Penambahan Anggran dan Perubahan Target
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		437.213.351.562,64	Rupiah	437.213.351.562,64	Rupiah	437.213.351.562,64	Rupiah	104.155.193,00	552.081.450,00	552.081.450,00	
1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2	Jumlah Pameran/ misi dagang	2	Jumlah Pameran/ misi dagang	2	Jumlah Pameran/ misi dagang	104.155.193,00	552.081.450,00	552.081.450,00	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	1	Pameran Dagang Nasional	1	Pelaku Usaha	1	Pelaku Usaha	1	Pelaku Usaha	20.155.193,00	268.387.700,00	268.387.700,00	
	2	Pameran Dagang Lokal	1	Pelaku Usaha	1	Pelaku Usaha	1	Pelaku Usaha	20.000.000,00	127.580.000,00	127.580.000,00	
	3	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	10	Pelaku Usaha	10	Pelaku Usaha	10	Pelaku Usaha	25.000.000,00	117.224.900,00	117.224.900,00	
	4	Peningkatan Citra Produk Ekspor	5	Produk	5	Produk	5	Produk	39.000.000,00	38.888.850,00	38.888.850,00	
X	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		60,00	Persen	60,00	Persen	60,00	Persen	235.204.530,00	271.203.497,00	271.203.497,00	
1	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		53,70	Persen	53,70	Persen	53,70	Persen	235.204.530,00	271.203.497,00	271.203.497,00	
	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang	450	Unit	450	Unit	450	Unit	130.523.530,00	166.531.997,00	166.531.997,00	
	2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	12	Orang	12	Orang	12	Orang	104.681.000,00	104.671.500,00	104.671.500,00	
XI	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		50,00	Persen	50,00	Persen	60,00	Persen	71.988.500,00	71.980.830,00	71.980.830,00	
1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		3	Jumlah promosi / pemasaran	3	Jumlah promosi / pemasaran	3	Jumlah promosi / pemasaran	71.988.500,00	71.980.830,00	71.980.830,00	
	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	1	UMKM	1	UMKM	4	UMKM	35.997.600,00	35.997.230,00	35.997.230,00	
	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2	UMKM	2	UMKM	4	UMKM	35.990.900,00	35.983.600,00	35.983.600,00	
XII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		3,48	Persen	3,48	Persen	4,73	Persen	170.000.000,00	691.549.230,00	596.077.590,00	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota		1	Dokumen	1	Dokumen	8	Dokumen	170.000.000,00	691.549.230,00	596.077.590,00	
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	8	Dokumen	8	Dokumen	10	Dokumen	20.000.000,00	20.120.000,00	35.120.000,00	Penambahan Target Kinerja dan Penambahan Pagu Anggaran Dalam Pembentukan Sentra IKM
	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	18	Dokumen	18	Dokumen	25	Dokumen	150.000.000,00	671.429.230,00	560.957.590,00	Anggaran Bergeser di 4 Sub Kegiatan
XIII	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		100,00	Persen	100,00	Persen	100,00	Persen	65.000.000,00	65.218.640,00	127.440.280,00	
1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		10	Pelaku IKM	10	Pelaku IKM	40	Pelaku IKM	65.000.000,00	65.218.640,00	127.440.280,00	Penambahan Target Kinerja
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	6	Dokumen	6	Dokumen	35	Dokumen	30.000.000,00	29.970.000,00	56.943.000,00	Penambahan Target Kinerja dan Penambahan Pagu Anggaran Dari Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	2	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	6	Dokumen	6	Dokumen	40	Dokumen	35.000.000,00	35.248.640,00	70.497.280,00	Penambahan Target Kinerja dan Penambahan Pagu Anggaran Dari Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
XIV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		2,26	Persen	2,26	Persen	9,29	Persen	33.470.220,00	33.250.000,00	66.500.000,00	
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	33.470.220,00	33.250.000,00	66.500.000,00	
	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Dokumen	33.470.220,00	33.250.000,00	66.500.000,00	Penambahan Target Kinerja dan Penambahan Pagu Anggaran Dari Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
JUMLAH TOTAL									7.862.501.375,00	9.343.306.448,00	9.500.309.808,00	157.003.360,00



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan OPD) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Tahun 2024 ini disusun dalam rangka mewujudkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2024 oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS) dan APBD Perubahan.

Penyusunan Renja Perubahan OPD Tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

Rencana Kerja ini sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan tahun 2024 dan diharapkan manfaat pelaksanaan kegiatan tersebut dapat membantu mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana sehingga berdampak pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Nunukan



serta sebagai penunjang pembangunan daerah Demikian untuk dilaksanakan.

Nunukan, Juli 2024

Kepala Dinas

Sabri, ST., M.Si

**Pembina Utama Muda IV/ C
NIP.19720109 200212 1 005**